

OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI PENYUSUNAN PETA ADMINISTRASI DAN PETA POTENSI DESA

Andrey Darmiansyah Edy Putranto¹, Rika Kartika², Muhammad Ibnu Ridho Al-abror^{3*}, Achmad Ilham Mujahid⁴, Rania Apriliani⁵

^{1,3*} Prodi Teknik industri, Fakultas Sains dan teknologi, Universitas Bina Bangsa

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

⁴ Prodi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

⁵ Prodi Ilmu komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 3, Pakupatan, Kota Serang, Indonesia

depandrey122@gmail.com¹, rikakartika.binabangsa@gmail.com², ridhoalabror1122@gmail.com^{3*},

achmadilhammujahid@gmail.com⁴, aprillia33730@gmail.com⁴

Abstract

Data keuangan yang akurat menjadi salah satu syarat penting bagi desa untuk menjalankan fungsi administratif, memberikan pelayanan kepada warga, dan merumuskan agenda pembangunan. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa Desa Pancanegara belum memiliki dokumen kewilayahan maupun pemetaan potensi yang tersusun secara rapi sehingga pengelolaan wilayahnya masih belum berjalan secara maksimal. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan desa melalui pembuatan peta administrasi dan peta potensi desa berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan yang dipakai adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang mencakup tahap koordinasi, identifikasi kebutuhan, pengumpulan data spasial dan nonspasial, pengolahan data dengan ARCGIS, sosialisasi, validasi, serta evaluasi. Luaran kegiatan berupa peta administrasi dan peta potensi desa dalam bentuk cetak maupun digital yang menampilkan batas wilayah, fasilitas umum, dan sebaran potensi unggulan desa. Kedua produk peta tersebut menunjang tertib administrasi, penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan aset, dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga turut mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Desa Pancanegara.

Keywords: Tata Kelola Pemerintahan Desa, Peta Administrasi Desa, Peta Potensi Desa; Sistem Informasi Geografis; Data Spasial

Abstrak

Reliable spatial data is essential for a village to carry out administrative duties, serve its residents, and set development priorities. Field findings show that Pancanegara Village had not yet compiled organized territorial records or a map of its local potential, leaving territorial management less than optimal. This community service activity was carried out to improve village governance by producing an administrative map and a village-potential map built on a Geographic Information System (GIS). Implementation followed the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, covering coordination, needs assessment, collection of spatial and non-spatial data, GIS data processing with ArcGIS, socialization, validation, and evaluation. The activity resulted in printed and digital versions of both maps, showing administrative boundaries, public facilities, and the spread of local resources. These maps support administrative order, development-planning documents, asset management, and evidence-based decisions, and thereby help strengthen governance and sustainable development in Pancanegara Village.

Kata kunci: Village Governance; Administrative Map; Village Potential Map; Geographic Information System; Spatial Data.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah unit pemerintahan terdepas yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga. Perbaikan tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, efektif, dan tanggap terhadap kebutuhan

warganya, sehingga kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa dapat terus meningkat secara berkelanjutan [1]; [2]. Sejak kewenangan desa semakin besar setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dituntut memiliki sistem administrasi serta basis data yang akurat sebagai pijakan dalam mengambil keputusan. Tata kelola desa yang ditopang data administrasi yang lengkap akan memudahkan penyusunan program pembangunan, pengelolaan aset, pelayanan kepada warga, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa [3].

Salah satu unsur penting dalam memperkuat administrasi desa adalah tersedianya gambaran keruangan dalam bentuk peta wilayah desa. Peta tersebut menampilkan batas antar-dusun, akses jalan, aliran sungai, serta lokasi sarana publik sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penyelesaian sengketa batas wilayah, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan [4]. Selain peta administrasi, peta potensi desa juga berperan penting untuk mengenali dan mendata berbagai sumber daya yang dimiliki desa, misalnya potensi pertanian, UMKM, peternakan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Informasi keruangan ini bisa dijadikan dasar penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal, promosi potensi desa, dan program pembangunan yang selaras dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan warga [5].

Meskipun peran keduanya cukup besar, pada kenyataannya masih banyak desa yang belum memperbarui dokumen kewilayahan maupun kajian potensinya. Akibatnya, catatan garis batas, lokasi sarana umum, dan potensi lokal tersimpan secara tidak teratur sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan administrasi, merumuskan kebijakan, dan menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis data [4].

Penggunaan teknologi geospasial kini menjadi pendekatan yang semakin banyak diandalkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa. Data keruangan yang disajikan dalam bentuk peta dapat memberikan gambaran kondisi wilayah secara akurat, sehingga membantu pemerintah desa merumuskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada warganya. Peta administrasi desa bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan juga basis data keruangan yang menopang penetapan batas wilayah, pendataan aset desa, penyediaan layanan publik, hingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Peta administrasi yang akurat memudahkan pemerintah desa mengambil keputusan berbasis data sekaligus menekan risiko

sengketa administrasi dan batas wilayah. Pemanfaatan data spasial digital secara optimal juga terbukti memberi manfaat nyata bagi desa dalam mendukung keterbukaan pengelolaan wilayah serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis bukti [6]; [7].

Selain peta administrasi, pembuatan peta potensi desa juga mempunyai peran strategis untuk memetakan sebaran sumber daya yang dimiliki desa, seperti potensi pertanian, perkebunan, UMKM, peternakan, objek wisata, dan fasilitas ekonomi lainnya. Informasi ini menjadi bekal bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal, mendorong investasi desa, serta memperkenalkan potensi unggulan kepada masyarakat luas maupun pihak luar [8]. Tersedianya peta administrasi dan peta potensi desa turut mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang berbasis data (*evidence-based governance*). Desa yang memiliki data keruangan akurat pada umumnya lebih mudah dalam menyusun kebijakan pembangunan, mengelola aset, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahannya [1].

Hasil pengamatan di Desa Pancanegara memperlihatkan bahwa pemerintah desa setempat belum mempunyai peta administrasi maupun peta potensi desa. Data mengenai batas wilayah, sebaran fasilitas umum, dan potensi desa masih tercecer di berbagai dokumen, sehingga menyulitkan proses administrasi, pelayanan kepada warga, penyusunan program pembangunan, serta penyampaian informasi desa kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penyediaan peta administrasi dan peta potensi desa sebagai sarana informasi keruangan yang dapat dipakai pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan tersedianya kedua peta tersebut, diharapkan mutu tata kelola pemerintahan desa dapat meningkat melalui data wilayah yang lebih akurat, terpadu, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Bertolak dari kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini digagas dengan tujuan menyusun peta administrasi desa dan peta potensi desa sebagai sarana informasi keruangan guna mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Lewat penyusunan kedua peta ini, diharapkan pemerintah desa memiliki dokumen keruangan yang akurat sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan potensi desa, dan penyampaian informasi kepada warga secara lebih efektif dan berkesinambungan.

Village governance dapat diartikan sebagai cara pengelolaan pemerintahan di tingkat desa yang

bertumpu pada prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi warga, efisiensi, efektivitas, daya tanggap, serta ketaatan pada aturan hukum guna mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Tata kelola yang baik menjadikan pemerintah desa sebagai lembaga publik yang mampu mengelola sumber daya, administrasi, keuangan, dan informasi secara profesional, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa [2].

Menurut Pilo et al., [3], keberhasilan tata kelola pemerintahan desa ditentukan oleh sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan diterapkan dalam setiap proses administrasi pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendongkrak kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peta administrasi desa adalah gambaran keruangan yang menunjukkan batas wilayah administrasi desa beserta unsur-unsur administratif di dalamnya, misalnya batas dusun, jaringan jalan, sungai, fasilitas umum, tata guna lahan, dan berbagai objek penting lain. Peta ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan aset desa, sampai penyelesaian sengketa batas wilayah [2].

Penelitian terbaru oleh Fortuna et al., [9] memperlihatkan bahwa pemetaan administrasi desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menghasilkan peta batas wilayah yang disepakati bersama antara pemerintah desa dan tokoh masyarakat, sehingga mampu mencegah potensi sengketa batas wilayah sekaligus dijadikan acuan resmi dalam pengelolaan aset desa [9].

Tersedianya peta administrasi desa memudahkan pemerintah desa dalam mendata aset, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, mengelola administrasi kependudukan, hingga berkoordinasi antarwilayah. Data keruangan yang akurat juga membuat pengambilan keputusan lebih tepat karena setiap kebijakan didasarkan pada kondisi wilayah yang sesungguhnya [10]. Dalam konsep *spatial governance*, data keruangan menjadi komponen penting dari sistem informasi pemerintahan karena dapat memadukan data wilayah dengan data sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu, penyusunan peta administrasi desa menjadi salah satu cara memperkuat kapasitas pemerintahan desa menuju tata kelola yang lebih efektif dan berbasis bukti

(*evidence-based governance*) [11]. Peta administrasi yang dilengkapi citra satelit beresolusi tinggi juga terbukti menjadi unsur mendasar dalam perencanaan pembangunan wilayah dan identifikasi potensi desa secara berkelanjutan [12].

Peta potensi desa merupakan peta tematik yang memuat informasi tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan potensi unggulan lain yang dimiliki suatu desa. Pemetaan potensi desa menjadi alat penting untuk mengenali keunggulan wilayah sehingga pemerintah desa dapat menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal serta kebutuhan warganya [13]. Menurut Sukri et al., [13], pemetaan potensi desa bukan sekadar pendataan sumber daya, melainkan juga menjadi landasan penyusunan arah pembangunan desa yang berkelanjutan. Informasi potensi fisik maupun nonfisik yang termuat dalam peta dapat digunakan untuk menetapkan prioritas pembangunan, mengembangkan ekonomi lokal, mendongkrak daya saing desa, serta mendukung penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan RKPDes.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berlangsung di Desa Pancanegara dengan sasaran meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan desa melalui pembuatan peta administrasi dan peta potensi desa berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pelaksanaannya mengikuti pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menjadikan pemerintah desa dan warga sebagai mitra aktif pada setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dipilih sebab mampu menghasilkan data keruangan yang lebih akurat melalui keterlibatan masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola informasi wilayah.

Kegiatan ini dijalankan dalam lima tahap, meliputi: koordinasi dan identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan peta administrasi dan peta potensi desa, sosialisasi serta validasi hasil pemetaan, dan diakhiri dengan evaluasi serta serah terima produk.

Identifikasi Kebutuhan dan Koordinasi

Tahap awal dimulai dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat guna mengetahui kondisi terkini administrasi wilayah serta data potensi desa. Pada tahap ini tim melakukan pengamatan lapangan, wawancara, dan penelusuran dokumen administrasi desa seperti profil desa, batas wilayah,

peta lama (bila ada), data kependudukan, dan dokumen RPJMDes. Hasil penelusuran memperlihatkan bahwa Desa Pancanegara belum memiliki peta administrasi maupun peta potensi yang terdokumentasi secara lengkap, sehingga penyusunan data keruangan diperlukan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengumpulan Data Spasial dan Nonspasial

Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data, yang mencakup data spasial dan data nonspasial. Pengambilan data keruangan ditempuh dengan beberapa cara, antara lain penelusuran lokasi secara langsung memakai GPS pada ponsel, pembacaan citra satelit beresolusi tinggi, dan pencatatan garis batas antar-dusun; serta pendataan jaringan jalan, sungai, fasilitas umum, dan tata guna lahan. Sementara data nonspasial dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa, Focus Group Discussion (FGD), dokumentasi profil desa, serta pendataan potensi ekonomi, pertanian, UMKM, peternakan, perikanan, objek wisata, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan masyarakat. Semua data tersebut kemudian diverifikasi melalui diskusi bersama pemerintah desa agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Penyusunan Peta Administrasi dan Peta Potensi Desa

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan perangkat lunak **ARCGIS** sebagai aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). Tahap pengolahan mencakup digitasi batas administrasi desa, digitasi batas dusun, digitasi jaringan jalan dan sungai, digitasi fasilitas umum, klasifikasi tata guna lahan, pemetaan sebaran potensi desa, serta pembuatan legenda, simbol, orientasi utara, koordinat, dan skala peta.

Keluaran dari tahap ini adalah Peta Administrasi dan Peta Potensi Desa, yang menampilkan batas desa, batas dusun, jaringan jalan, sungai, fasilitas umum, serta sebaran potensi pertanian, perkebunan, UMKM, peternakan, perikanan, pariwisata, fasilitas ekonomi, dan potensi unggulan desa.

Sosialisasi dan Validasi Peta

Peta yang telah dibuat selanjutnya dipresentasikan kepada pemerintah desa lewat kegiatan sosialisasi, dengan tujuan mengenalkan fungsi peta administrasi dan peta potensi desa, meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang pemanfaatan data keruangan, serta menjangkau masukan atas hasil pemetaan.

Serah Terima Produk

Tahap berikutnya adalah serah terima produk kepada Pemerintah Desa Pancanegara, berupa peta administrasi desa berukuran 1x1 meter, peta potensi desa berukuran 1x1 meter, berkas digital peta (.jpg), dan basis data keruangan desa yang dapat diperbarui secara berkala.

Dengan tersedianya produk-produk tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat memakai data keruangan sebagai dasar penyusunan RPJMDes, RKPDes, pengelolaan aset desa, pelayanan publik, promosi potensi desa, dan pengambilan keputusan pembangunan yang lebih efektif. Selain itu, dilakukan pula validasi partisipatif berupa pengecekan langsung terhadap batas wilayah, lokasi fasilitas umum, dan sebaran potensi desa bersama perangkat desa, kepala dusun, serta tokoh masyarakat. Bila ditemukan data yang tidak sesuai, akan dilakukan revisi sampai diperoleh peta yang sesuai dengan kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dan Identifikasi Permasalahan

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama Kepala Desa Pancanegara beserta perangkat desa untuk memaparkan tujuan, ruang lingkup, dan tahapan pelaksanaan PKM. Dari pertemuan tersebut disepakati jadwal kegiatan, lokasi survei lapangan, serta penunjukan perangkat desa yang akan mendampingi proses pemetaan. Setelah itu, tim melakukan pengamatan lapangan dan wawancara dengan perangkat desa untuk mengetahui kondisi administrasi dan data potensi desa. Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Pancanegara belum memiliki peta administrasi maupun peta potensi desa yang tersusun secara sistematis. Data batas wilayah, sebaran fasilitas umum, tata guna lahan, dan potensi unggulan masih terpisah-pisah dalam berbagai dokumen, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan administrasi dan menyusun program pembangunan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Husain & Ashari [7], yang menyebutkan bahwa tanpa peta administrasi, pemerintah desa akan kesulitan mengelola wilayah, mendata aset, serta menyediakan informasi keruangan bagi masyarakat. Selain itu, Rahman et al., [5] juga menjelaskan bahwa penyusunan peta administrasi dan peta potensi menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang berbasis data.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 1. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan dan Koordinasi

Pengumpulan Data Spasial dan Nonspasial

Tahap berikutnya yaitu pengumpulan data spasial melalui survei lapangan dengan GPS pada telepon pintar, interpretasi citra satelit, serta penelusuran batas wilayah bersama perangkat desa. Bersamaan dengan itu, dikumpulkan pula data nonspasial berupa profil desa, data kependudukan, potensi ekonomi, fasilitas umum, kelembagaan masyarakat, dan potensi sumber daya alam. Seluruh data yang terkumpul kemudian diverifikasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perangkat desa guna memastikan kecocokan antara data hasil survei dan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan partisipatif ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan mengenai lokasi batas wilayah maupun potensi desa, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

Tahap pengumpulan data ini berhasil mendata **41 titik koordinat** dengan GPS berbasis Google Map. Titik-titik koordinat tersebut terdiri atas **24 Rukun Tangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW) batas dusun, 1 fasilitas umum, 19 fasilitas pendidikan dan kesehatan, 7 tempat ibadah, serta 4 lokasi UMKM**. Seluruh data keruangan itu kemudian diverifikasi bersama perangkat desa hingga diperoleh tingkat kesesuaian data lapangan sebesar **90%**.

Selain data keruangan, tim juga memperoleh data nonspasial berupa profil desa, data kependudukan, tata guna lahan, potensi ekonomi, kelembagaan masyarakat, serta data UMKM, yang kemudian dipadukan ke dalam basis data desa. Proses verifikasi lewat *Focus Group Discussion* menghasilkan **2 masukan**, di mana **2 masukan** langsung dapat diakomodasi dalam penyusunan peta, sementara dua masukan lainnya memerlukan pengecekan ulang di lapangan.

Pendekatan partisipatif terbukti meningkatkan akurasi data lapangan karena warga setempat berperan sebagai sumber informasi

utama mengenai kondisi wilayahnya. Temuan ini sejalan dengan Rendra et al., [12] yang mencatat bahwa pelibatan komunitas dalam pemetaan menghasilkan gambaran yang lebih mewakili kondisi sebenarnya sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap peta yang dihasilkan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rendra et al., [15] yang menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif efektif diterapkan dalam menyusun peta administrasi desa yang akurat melalui keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelompok masyarakat.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Gambar 2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Spasial dan Nonspasial

Penyusunan Peta Administrasi dan Potensi Desa

Data keruangan yang sudah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak ARCGIS hingga menghasilkan dua produk utama, yakni Peta Administrasi Desa dan Peta Potensi Desa Pancanegara. Pengolahan peta administrasi mencakup digitasi batas administrasi desa, batas dusun, jaringan jalan, sungai, fasilitas umum, serta pembuatan unsur kartografi seperti legenda, skala, orientasi utara, dan sistem koordinat, sehingga dihasilkan peta yang menggambarkan kondisi wilayah desa secara utuh, meliputi batas administrasi desa, batas dusun, jaringan transportasi, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan unsur geografis lainnya. Sejalan dengan itu, Peta Potensi Desa dibuat dengan memetakan sebaran berbagai potensi desa, mencakup sektor pertanian, perkebunan, UMKM, peternakan, fasilitas ekonomi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta potensi lain yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan desa. Kedua peta ini memudahkan pemerintah desa, baik dalam penyusunan RPJMDes, pengelolaan aset desa, pelayanan administrasi, dan penyediaan informasi wilayah bagi masyarakat, maupun dalam menetapkan prioritas

pembangunan serta strategi pengembangan ekonomi lokal berdasarkan gambaran lokasi setiap potensi yang ada. Data ini juga dapat dipakai sebagai sarana promosi desa kepada investor maupun pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan Alpiana et al., [4] yang menyebutkan bahwa peta administrasi merupakan dokumen penting dalam menunjang tertib administrasi pemerintahan desa, dan diperkuat oleh Sukri et al., [14] yang menjelaskan bahwa pemetaan potensi desa dapat menjadi dasar penyusunan arah pembangunan desa yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan pemanfaatan potensi lokal secara optimal.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)
Gambar 3. Pelaksanaan Penyusunan Peta

Sosialisasi, Validasi Hasil Pemetaan dan Serah Terima Peta

Peta administrasi dan peta potensi yang telah selesai disusun kemudian dipaparkan kepada pemerintah desa dalam kegiatan sosialisasi, yang diikuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat. Pada tahap validasi, peserta menyampaikan masukan mengenai beberapa lokasi fasilitas umum, batas dusun, serta posisi sejumlah potensi ekonomi yang telah berubah di lapangan. Seluruh masukan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses revisi hingga diperoleh peta yang sesuai dengan kondisi aktual desa.

Validasi yang dilakukan secara partisipatif ini meningkatkan akurasi produk sekaligus memperkuat komitmen pemerintah desa untuk menjadikan peta sebagai dokumen resmi desa. Cara ini selaras dengan konsep *Participatory Rural Appraisal* yang menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)
Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Validasi Hasil Pemetaan, dan Serah Terima Peta

KESIMPULAN

Kesimpulan

Program pengabdian yang dilaksanakan di Desa Pancanegara ini terbukti dapat memperbaiki mutu pengelolaan pemerintahan setempat melalui penyusunan dokumen peta wilayah dan kajian potensi desa dengan dukungan teknologi SIG. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari koordinasi, identifikasi kebutuhan, pengumpulan data spasial dan nonspasial, pengolahan data dengan ARCGIS, sosialisasi, validasi, hingga serah terima produk, berhasil dijalankan sesuai rencana yang telah disusun. Kegiatan ini menghasilkan produk utama berupa peta administrasi dan peta potensi desa dalam bentuk cetak maupun digital yang dapat dijadikan basis data keruangan desa.

Peta administrasi yang dihasilkan memuat informasi batas wilayah, batas dusun, jaringan jalan, sungai, dan fasilitas umum, sehingga mampu mendukung tertib administrasi pemerintahan, pengelolaan aset desa, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Adapun peta potensi desa menampilkan sebaran potensi pertanian, perkebunan, UMKM, peternakan, perikanan, fasilitas ekonomi, dan potensi unggulan lainnya, yang dapat dijadikan dasar penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat.

Saran

Mengacu pada hasil pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa Pancanegara disarankan untuk secara berkala memperbarui data keruangan yang dimilikinya, terutama apabila terjadi perubahan garis batas, penambahan infrastruktur, penambahan fasilitas umum, atau perkembangan potensi ekonomi desa. Pembaruan data yang dilakukan secara berkala akan menjaga akurasi informasi sehingga peta administrasi dan peta

potensi tetap relevan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, kapasitas aparatur desa juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan terkait pengelolaan Sistem Informasi Geografis (SIG), pengoperasian perangkat lunak ARCGIS, dan pengelolaan basis data keruangan, sehingga pemerintah desa mampu memperbarui dan mengembangkan peta secara mandiri tanpa harus bergantung pada pihak luar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Terima kasih pertama-tama disampaikan kepada Universitas Bina Bangsa atas dukungan fasilitas, pendanaan, serta kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Pancanegara beserta seluruh perangkat desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat yang telah memberi izin, dukungan, dan berpartisipasi aktif sepanjang proses koordinasi, pengumpulan data, sosialisasi, hingga validasi peta administrasi dan peta potensi desa. Kerja sama dan keterbukaan yang ditunjukkan sangat membantu kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan tim pelaksana, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bimbingan, kerja sama, dan dukungannya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi Desa Pancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Hidayatulloh and H. Purnamasari, "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik di Desa Karang Anyar," *Indones. J. Polit. Policy*, vol. 5, no. 2, pp. 276–281, 2023, doi: <https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i2.10674>.
- [2] A. Hazijah Daulay *et al.*, "Perkembangan Tata Kelola Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Era Otonomi Desa," *J. law, Hum. Right Citizsh.*, vol. 3740, no. 2024, pp. 156–164, 2023, doi: <https://doi.org/10.34007/jlpr.v2i2.80>.
- [3] R. Pilo, J. H. Posumah, and F. Tulus, "Jurnal Administrasi Publik JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 203 - 210," *J. Adm. Publik*, vol. VIII, no. 3, pp. 203–210, 2022, doi: <https://doi.org/10.35797/jap.v8i3.42260>.
- [4] A. Alpiana, D. Rahmawati, M. F. Firaz, Ariyanto, B. F. A. Matrani, and J. S. Adiansyah, "Bantuan Teknis Pembuatan Peta Administrasi Untuk Desa Teros, Lombok Timur," *Transform. J. Pengabd. PADA Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 71–79, 2022, doi: <https://doi.org/10.31764/transformasi.v2i2.10003>.
- [5] F. Rahman, A. A. C. Santi, and F. S. C. N. Nurdin, "PENYUSUNAN PETA ADMINISTRASI DAN POTENSI DESA DALAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA MALANGSUKO," *Pros. Konf. Nas. Pengabd. Masy.*, vol. 6, pp. 612–617, 2025, doi: <https://new-conference.unisma.ac.id/index.php/KOPEMAS/article/view/1846>.
- [6] B. Rahman, "Analisis Manfaat Data Digital Spasial Bagi Desa," *PONDASI*, vol. 27, no. 1, pp. 88–97, 2022, doi: <https://doi.org/10.30659/pondasi.v27i1.22891>.
- [7] F. Husain and A. Nadhilah Qistina Ashari, "Pengadaan Peta Administrasi Desa Patallasang," *J. Pengabd. Masy. Hasanuddin*, vol. 4, no. 2, pp. 92–99, 2023, doi: <https://doi.org/10.20956/jpmh.v4i2.30230>.
- [8] E. Ridhawati, D. Susianto, Buchori, Taufik, and Mistina, "Pengembangan Media Tata Kelola dan Informasi Potensi Desa Berbasis E-Government pada Desa Tiyuh Karta Sari," *NEARJ. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 29–34, 2022, doi: <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.569>.
- [9] E. D. Fortuna and N. A. Hasby, "Pemetaan Administrasi Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dan GIS: Studi Kasus Desa Salarri, Kabupaten Polewali Mandar," *J. Pengabd. Masy. BHINNEKA*, vol. 3, no. 4, pp. 172–178, 2025, doi: <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.131>.
- [10] S. Ayu Pranitika and V. Oktari, "Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan," *JIBEMA J. Ilmu Bisnis, Ekon. Manajemen, dan Akunt.*, vol. 2, no. 3, pp. 215–219, 2025, doi: <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i3.117>.
- [11] P. A. N. Darmawan, M. Sholihah, and N. M. Indrayani, "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Smart Village Melalui Digitalisasi Layanan Administrasi," *IDAROTUNA J. Administrative Sci.*, vol. 6, no. 2,

- pp. 268–280, 2025, doi:
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.159>.
- [12] F. Zacky and Sulaeha, “Pembuatan Peta Administasi dan Peta Citra sebagai Media Informasi Desa Sukamaju, Kab.Sinjai, Sulawesi Selatan,” *J. Pengabdi. Masy. BANGSA*, vol. 3, no. 2, pp. 515–519, 2025, doi:
<https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i2.2228>.
- [13] M. I. Rendra *et al.*, “Penyusunan Peta Potensi Desa dengan Pemetaan Partisipatif di Desa Kedungsari Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro,” *J. SOLMA*, vol. 14, no. 2, pp. 2854–2864, 2025, doi:
<https://doi.org/10.22236/solma.v14i2.18337>.
- [14] Sukri *et al.*, “Sosialisasi dan pemetaan potensi desa sebagai arah pembangunan yang berkelanjutan,” vol. 3, no. 1, pp. 19–27, 2023, doi:
<https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.599>.
- [15] M. I. Rendra, M. M. Huda, R. A. Sandy, S. Roisewajid, R. Y. Saputra, and A. N. Abrori, “Penyusunan Peta Administrasi Desa dengan Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro,” *Abdimas Galuh*, vol. 6, no. 1, pp. 847–856, 2024, doi:
<https://doi.org/10.25157/ag.v6i1.13741>.